

EVALUASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PENGGUNAAN PESTISIDA DI KABUPATEN SIGI

Andi Hilda

hihil_idha@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The local government issued a policy on the establishment of investigation committees who are in charge of supervising the pesticide provision, distribution, use of fertilizers and pesticides in a coordinated way between the center and the regions, between relevant agencies in field of fertilizers and pesticides in the use and distribution of pesticides. This study aims at finding out the description of the evaluation of pesticide control policies in District Sigi. This type of research used is qualitative research with descriptive research method. The informants are Pesticides Control Commission and Chairman of Farmers Group in District Sigi consisting of 5 people. The research result indicates that of the six indicators of policy implementation evaluation, there are two indicators which become problem and should be considered in the implementation of policy implementation namely effectiveness that is considered not running effectively based on a comparison between input and output as well as the efficiency, the amount of efforts that have been made yet it is still not satisfactory. In terms of efficiency, many efforts have been made but it is still not satisfactory. Observation results prove that the groups of farmers still need direction in the use of pesticides. By looking at the results of this research, it is expected in order to implement a policy, we should pay attention to the effectiveness and efficiency so that the program has been created and efforts have been conducted are able to run well and give a positive impact as well as to overcome the existing problems in the field.

Keywords: *Implementation, Evaluation Policy, Oversight*

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten penghasil padi sawah terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Parigi Moutong. Faktor iklim yang mendukung serta potensi yang dimiliki daerah ini, maka masyarakat berusaha memanfaatkan potensi yang ada sebaik mungkin. Kabupaten Sigi memiliki sumberdaya lahan yang potensial bagi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Menunjang kehidupan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Sigi salah satunya adalah pada sektor pertanian. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Daerah mengeluarkan Kebijakan tentang pembentukan komisi pengawasan pestisida yang dituangkan oleh Keputusan Bupati Sigi Nomor 520.33.206 Tahun 2008 untuk melaksanakan tugas seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian

Nomor: 42/ Permentan/ SR. 140/ 5/ 2007 Tentang Pengawasan Penggunaan Pestisida.

Pengawasan pengadaan, peredaran, pungenan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terkordinasi antara pusat dan daerah, antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota merupakan wadah kordinasi pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota (Irianto, 2013). Dengan keterlibatan instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida dalam komisi pengawasan tersebut diharapkan permasalahan peredaran dan pungenan pupuk dan pestisida yang terjadi di daerah dapat diatasi secara cepat dan tepat. Sebagai kelembagaan *Ad Hock*, KP3 memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengadaan, penyaluran

sekaligus memantani Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pupuk bersubsidi. Hal yang sama juga dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pestisida. Dengan tugas yang demikian mulia, KP3 sebetulnya memiliki fungsi yang sangat strategis, khususnya dalam menolong para petani agar memperoleh pupuk yang dibutuhkan ketika musim tanam berlangsung.

KP3 merupakan tim yang pasif dalam bekerja. Surat Keputusannya ada, tapi kegiatannya nyaris tak terdengar. KP3 tercatat dengan kepengurusannya yang lengkap, namun ketika dicari langkah-langkah nyata di lapangan sangat sulit ditemukan termasuk hasil dari kegiatannya berupa laporan. Belum optimalnya kinerja KP3 di daerah, boleh jadi disebabkan oleh belum terbangunnya "*net-working thinking*" yang utuh diantara para pihak yang terlibat dalam urusan pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida ini. Hal ini dapat dipahami, karena berdasarkan temuan di lapangan, ternyata banyak KP3 di Kabupaten/ Kota yang kurang mendapat "penghormatan" dari para anggotanya sendiri. Jadi, mana mungkin KP3 akan memiliki kewibawaan di mata publik, sekiranya para anggota KP3 sendiri, tidak pernah merasa bangga dengan posisi yang disandangnya. Malah ada juga anggota yang merasa lega jika KP3 tidak banyak kegiatan.

Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida termasuk pembentukan komisi pengawasan telah diterbitkan, namun kenyataannya penggunaan pestisida tidak memenuhi aturan yang berlaku bahkan belum adanya bukti fisik laporan kinerja dari komisi pengawasan sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/ SR.140/ 5/ 2007 Bab.V Pelaporan Pasal 20. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemerintah mengenai pembentukan komisi pengawasan pestisida tersebut perlu dievaluasi dan di analisis.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kebijakan publik seringkali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran tersebut dapat diartikan bahwa evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai rencana, atau bahkan sebuah kebijakan tidak bisa dijalankan, sehingga dengan adanya evaluasi dapat memberikan masukan, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan dampak/ hasil kebijakan yang terjadi.

Rumusan Masalah pada penulisan ini adalah Bagaimana gambaran evaluasi dari kebijakan pemerintah tentang pengawasan pestisida di Kabupaten Sigi?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk evaluasi terhadap indikator yang menjadi hambatan dari kebijakan pemerintah tentang pengawasan pestisida di Kabupaten Sigi.

Evaluasi Kebijakan Publik, dalam tahapan pelaksanaannya menggunakan pengembangan beberapa indikator untuk menghindari timbulnya bias serta sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik.

Penelitian ini akan mengkaji tentang fungsi, nilai dan tindakan yang terangkum dalam kriteria rekomendasi kebijakan. Teori Dunn mengemukakan kriteria rekomendasi kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, teori ini menjadi tolak ukur dalam penelitian untuk mengkaji evaluasi dari kebijakan yang berlaku tentang pengawasan pestisida. William N. Dunn (2003) aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagai berikut:

Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

(Sumber: Dunn, 2003:610)

Kriteria-kriteria tersebut merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya.

METODE

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian Deskriptif. Nawawi (2003) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah

penelitian kualitatif dimana penyajian datanya dilakukan dan disampaikan dengan menggambarkan fenomena sesuai dengan obyek yang diteliti secara sistematis berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian setelah informan memberikan jawaban yang sesuai dengan fokus pertanyaan baik melalui wawancara maupun pengisian kuesioner dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan, arsip, dokumen-dokumen serta data dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap kebijakan yang diterapkan harus memperoleh pengawasan supaya dapat dipertanggungjawabkan. Wujud pengawasan tersebut berupa evaluasi kebijakan yang dapat dilaksanakan setelah beberapa waktu atau periode berjalannya suatu kebijakan. Selain menilai efektifitas, evaluasi juga berfungsi untuk menilai sejauhmana tujuan dari suatu kebijakan berhasil dicapai. Riant Nugroho dalam premisnya mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti, sehingga perlu ada klausula “dapat diganti setelah dilakukan evaluasi” dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip “ganti pejabat, harus ganti peraturan”. Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena “keinginan” atau “selera” pejabat yang saat itu berwenang (Nugroho, 2008: 471).

Nugroho (2008: 472) mengemukakan bahwa tujuan evaluasi bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan pencapaian

suatu kebijakan, serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut. Pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang ilegal, rendah mutu dan palsu serta penjualan di tingkat konsumen dengan mengeluarkan kebijakan membentuk Tim pengawasan pupuk dan pestisida.

Tim pengawasan pupuk dan pestisida mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi di tingkat petani tentang tahapan penebusan pupuk bersubsidi dengan pola tertutup menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara berjenjang
- 2) Pembinaan terhadap petugas lapangan untuk membimbing petani/kelompok tani membuat RDKK sebagai dasar penebusan pupuk bersubsidi sehingga petani dapat menggunakan pupuk bersubsidi sesuai dengan asas 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu, serta pendampingan terhadap penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi
- 3) Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran penggunaan dan harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran penggunaan pestisida terutama pestisida terbatas pakai, pestisida belum terdaftar, pestisida habis masa berlakunya dan pestisida dari luar
- 5) Pengawasan terhadap standar mutu dan jumlah bahan teknis, formulasi, wadah, efektifitas, pelabelan dan harga pupuk dan pestisida.

Tim pengawas pupuk dan pestisida melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah ini, digunakan teori William N. Dunn yang menyatakan bahwa dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kriteria yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Di

bawah ini adalah beberapa kriteria evaluasi yang dikaji dalam indikator penelitian sehingga dengan fokus kajian dapat diungkapkan fenomena yang berkaitan dengan Pengawasan Pestisida. Masing-masing fokus kajian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alur pikir dan definisi konsep akan dicermati secara mendalam menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga observasi dan wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian akan menghasilkan tanggapan dari informan mengenai evaluasi kebijakan. Hal ini dikemukakan dalam fokus kajian yang meliputi : 1) *Efektivitas*: bahwa dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional untuk mencukupi kebutuhan pangan, pemerintah telah membuat kebijakan dengan membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang mengemban tugas untuk memantau dan mengawasi penyediaan, penyaluran, penggunaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas. Ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan ini belum berjalan dengan efektif berdasarkan suatu perbandingan antara masukan dan keluaran dengan pembuktian bahwa belum adanya bukti fisik yang menggambarkan kinerja tim dan hasil yang diperolehnya dari kegiatan yang telah di programkan. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk mengevaluasi output dari dibuatnya kebijakan ini. Seyogyanya KP3 secara optimal dapat melakukan pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pusat dan daerah dan melibatkan seluruh instansi terkait. 2) *Efisiensi*: berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah

merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini berfokus pada seberapa besar upaya yang dilakukan agar permasalahan yang ada dapat terpecahkan. Berikut gambaran mengenai efisiensi berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah dengan membentuk Komisi Pengawasan Pestisida kurang memperhatikan faktor efisiensi. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah namun bukanlah cara yang tepat mengatasi permasalahan yang ada. Komisi yang dibentuk tidak berfungsi sebagaimana ketentuan yang ada dalam kebijakan. Bahkan upaya yang dilakukan malah diminimalisir. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. 3) *Kecukupan*: Kecukupan berkaitan dengan hal sejauhmana pencapaian tujuannya yang diinginkan, sejauhmana pencapaian hasil tersebut memecahkan masalah yang berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, nilai dan atau kesempatan. Pemerintah daerah yang menangani masalah pestisida kurang memperhatikan pengetahuan masyarakat serta informasi yang beredar tentang kebutuhan, peredaran, dan penggunaan pestisida, sehingga hasil diberlakukannya kebijakan ini kurang memuaskan jika dilihat pada saat ini. Meskipun petani telah mahir dalam mengelola tanamannya, penggunaan pestisida belum dapat dikatakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Data lapangan menunjukan memang

memerlukan pengawasan yang lebih ketat dalam hal kebutuhan, peredaran, dan penggunaan pestisida. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa kebijakan ini telah melakukan berbagai upaya namun belum memuaskan kelompok yang menjadi sasaran dikeluarkannya kebijakan ini. Banyak upaya yang telah dilakukan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan petani. Hasil observasi membuktikan bahwa kelompok petani masih sangat membutuhkan arahan dalam penggunaan pestisida. 4) *Perataan*: Pada sub fokus perataan ini, sebuah kebijakan memiliki beberapa kelompok sasaran yang dituju sehingga upaya penetapan sebuah kebijakan perlu diukur apakah manfaat program telah dirasakan manfaatnya pada kelompok sasaran tersebut. Dalam kebijakan pengawasan pestisida, yang menjadi kelompok sasaran adalah para petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Sigi. Untuk dapat menjawab permasalahan “perataan” ini pertanyaan yang diajukan adalah apakah manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu yang dituju. Hasil survei lapangan juga membuktikan bahwa dalam RDKK yang diperoleh dari petugas lapangan belum akurat. Buktinya, ada beberapa petani yang memperoleh pestisida yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang petani sulit mendapatkan pestisida padahal mereka memiliki perluasan daerah tanam. Akhirnya terjadilah kesalahan dalam penggunaan, ada yang menggunakan kurang dari ketentuan yang berlaku, ada pula yang kelebihan dalam hal takaran penggunaan. 5) *Responsivitas*: Responsivitas dalam konsep evaluasi kebijakan adalah untuk menjawab apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Suatu kebijakan yang hasilnya telah memuaskan kelompok-kelompok tertentu berarti telah berhasil dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Meskipun tidak

akan mencapai tingkat kepuasan pada semua pihak. Bagi warga Kabupaten Sigi khususnya petani, keikutsertaan mereka dalam program pengawasan dikarenakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pestisida sesuai dengan keadaan lapangan. Sedangkan bagi pemerintah daerah, kebijakan pembentukan komisi pengawasan ini merupakan salah satu pilihan program pembangunan di daerah dalam bidang pertanian dan sebagai terobosan untuk membuka isolasi daerah yang dulunya merupakan lahan yang tidak dapat dimanfaatkan. Yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. 6) *Ketepatan*: Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan tentang pengawasan pestisida sangat tepat untuk membimbing petani agar dapat menggunakan pupuk bersubsidi sesuai dengan asas 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu, serta pendampingan terhadap penerapan pemupukan berimbang spesifik. Sebuah kebijakan yang diimplementasikan melalui program-program kepada kelompok-kelompok sasaran perlu

dinilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaat program akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan, sehingga akan memperlihatkan apakah program tersebut telah tepat atau kurang tepat. Hal ini yang ini yang membuat peneliti berasumsi bahwa kebijakan pemerintah dengan membentuk Komisi Pengawasan termasuk pengawasan dalam penyusunan kebutuhan petani belum bermanfaat bagi para petani. Komisi ini harusnya melihat secara nyata dan merata ke semua kelompok tani, berapa jumlah pestisida yang dibutuhkan petani dan berapa penambahan perluasan daerah tanam agar kebutuhan petani dapat terpenuhi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari 6 indikator evaluasi implementasi kebijakan, ada 2 (dua) indikator yang menjadi permasalahan dan harus diperhatikan dalam pengimplementasian kebijakan. Adapun indikator tersebut yaitu: 1) Efektivitas. Kebijakan ini belum berjalan dengan efektif berdasarkan suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Seyogyanya KP3 secara optimal dapat melakukan pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pusat dan daerah dan melibatkan seluruh instansi terkait. Oleh karena itu keberadaan KP3 baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang merupakan wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida dan dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota memiliki peran yang sangat strategis, dan 2) Efisiensi. Kebijakan ini telah melakukan berbagai upaya namun belum memuaskan kelompok yang menjadi sasaran dikeluarkannya kebijakan ini. Artinya, upaya yang telah dilakukan tidak memperhatikan faktor efisiensi. Banyak

upaya yang telah dilakukan namun masih belum memuaskan. Hasil observasi membuktikan bahwa kelompok petani masih sangat membutuhkan arahan dalam penggunaan pestisida

Rekomendasi

Hasil penelitaian menunjukan beberapa hal yang berkaitan dengan belum efektif nya implementasi dari kebijakan ini yang ditunjukkan melalui ketidaksesuaian antara masukan dan keluaran. Dengan demikian di sarankan berkenaan dengan evaluasi dari kebijakan pemerintah tentang pengawasan pestisida di Kabupaten Sigi, maka peran KP3 yang bertugas mengawasi peredaran dan penggunaan pestisida perlu memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi nya. Hal ini sangat penting agar program yang telah dibuat dan upaya yang telah dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif serta mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, khususnya kepada tim penyunting Ibu Dr. Roslina Amu, M.Si and Ibu Dr. Dirdja Yahya, M.Sc. Akhir kata, penulis ucapkan banyak terimah kasih kepada Allah SWT dengan Rahmat dan hidayanya, kiranya apa yang telah di berikan ini dapat membawa manfaat dan semoga di balas dengan pahala yang lebih baik AMIN. *Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, SZ. 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djohan, Djohermansyah. 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah 1999*. Penerbit Yasrif Watampone. Jakarta.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Girsang, Warlinson. 2009. *Dampak Negatif Penggunaan Pestisida*. Fakultas Pertanian. Universitas Simalungun. Pematang Siantar.
- Islami, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara. Jakarta
- Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada. University Press. Yogyakarta.